

SKRIPSI
ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Pembimbing I: Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Pembimbing II: Antoni Putra, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2026

	No. Alumni Universitas	Muhammad Arya Zidan	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang / 03 Mei 2003 b. Nama Orang Tua : Junaidi, Noveniliza c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Pidana e. NIM : 2210112170	f. Tanggal Lulus : 01 Juli, 2026 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan i. IPK : 3,62 j. Alamat : Jalan Raya Indarung No.66	

ANALISIS PERBANDINGAN PERATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(Muhammad Arya Zidan, 2210112170, Hukum Pidana (PK-IV), Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 92 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia. Indonesia telah mengatur tindak pidana perdagangan orang secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tahun 2026, pengaturan tindak pidana perdagangan orang turut mengalami perubahan dalam sistem hukum pidana nasional. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana perbandingan pengaturan anatara kedua undang-undang tersebut serta implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkhusus pada pasal 445-456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan Pasal 2 Undang-Undang No 21 Tahun 2007 meliputi unsur-unsur tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan sekunder berupa literatur, dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan serta perbedaan yang signifikan antara kedua undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 hadir sebagai *lex specialis* dengan pengaturan yang lebih komprehensif dan rinci, mencakup mekanisme perlindungan korban, pemulihan, serta sistem kerja sama internasional. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengintegrasikan tindak pidana perdagangan orang ke dalam kodifikasi hukum pidana nasional dengan sejumlah penyesuaian dalam perumusan delik dan ancaman sanksi, keberadaan dua regulasi ini berpotensi menimbulkan benturan norma hukum antara kedua aturan tersebut sehingga diperlukan harmonisasi dan kejelasan mengenai pemberlakuan asas *Lex specialis derogat legi generali* serta asas *Lex posterior derogat legi priori* dalam praktik hukumnya.

Kata Kunci: Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Perbandingan, *Lex specialis Derogat Legi Generali*, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 01 Juni 2026.

Penguji,

Tanda Tangan 	1. 	2. 
Muhammad Arya Zidan	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Yandrizza., S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Pidana: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Muhammad Arya Zidan	No. Alumni Faculty
	a. Place/ Date of Birth : Padang / May 3 rd 2004 b. Parent Name : Junaidi, Noveniliza c. Faculty : Law d. Concentration : Business Criminal Law e. NIM : 2210112170		f. Graduation Date : July 01, 2026 g. Pass Predicate : Cumlaude h. Length Of Study : 3 Years 11 Months i. GPA : 3,62 j. Address : Jalan Raya Indarung No.66

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REGULATIONS ON THE CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING IN HUMANS IN LAW NUMBER 21 OF 2007 ON THE CRIMINAL ACTS OF TRAFFICKING IN HUMANS WITH LAW NUMBER 1 OF 2023 ON THE CRIMINAL CODE

(Muhammad Arya Zidan, 2210112170, Criminal Law (PK-IV), Faculty of Law, Andalas University, 92 pages, 2026)

ABSTRACT

*Human trafficking is an extraordinary crime that violates human dignity and human rights. Indonesia has specifically regulated the crime of human trafficking through Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Human Trafficking. However, with the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which came into effect in 2026, the regulation of the crime of human trafficking has also undergone changes in the national criminal law system. This raises fundamental questions regarding how the regulations between the two laws compare and their implications for law enforcement in Indonesia. This study aims to analyze and compare the regulation of the crime of human trafficking in Law Number 21 of 2007 with Law Number 1 of 2023, specifically in Articles 445-456 of Law Number 1 of 2023 with Article 2 of Law Number 21 of 2007, covering the elements of the crime, the elements of the crime, and criminal sanctions. The research method used is normative juridical, using a statute approach and a comparative approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation, secondary materials in the form of literature and previous research, and tertiary legal materials as supporting material. The results of this study indicate significant similarities and differences between the two laws. Law Number 21 of 2007 serves as *lex specialis* with more comprehensive and detailed regulations, encompassing victim protection mechanisms, redress, and an international cooperation system. Meanwhile, Law Number 1 of 2023 integrates the crime of human trafficking into the national criminal code with several adjustments in the formulation of offenses and the threat of sanctions. The existence of these two regulations has the potential to create conflicts between legal norms, thus necessitating harmonization and clarity regarding the application of the principles of *lex specialis derogat legi generali* and *lex posterior derogat legi priori* in legal practice.*

Keywords: *Human Trafficking, Crime, Comparison, Lex specialis Derogat Legi Generali, Lex Posterior Derogat Legi Priori.*

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by July 1st, 2026.

Examiner,

Signature 	1. 	2. 
Muhammad Arya Zidan	Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H.	Yandrizza., S.H., M.H.

Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature: